

Upaya Meningkatkan Kapasitas Produksi Beras

Description of the control of the co

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo Dahiri Martha Carolina Rastri Paramita Rosalina Tineke Kusumawardhani Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri Orlando Raka Bestianta

Upaya Meningkatkan Kapasitas Produksi Beras

p.3

Turunnya produksi beras berpotensi terhadap ketersediaan akses pangan bagi masyarakat. Seperti melonjaknya harga beras beberapa tahun ini merupakan salah satu indikator adanya permasalahan akses pangan. Penyebab utama ancaman produksi pangan yaitu alih fungsi penggunaan lahan, biaya input produksi, dan minimnya insentif petani sebagai produsen beras. DPR RI khususnya Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk membuat program penanggulangan alih fungsi lahan dengan memberikan insentif bagi petani yang masuk dalam RTRW LP2B. Insentif tersebut berupa beasiswa bagi anak petani, bantuan rice miling unit dan subsidi pupuk khusus.

Optimalisasi PNBP Kepolisian

p.8

Sejak tahun 2021 persentase realisasi PNBP terhadap penerimaan negara menujukan tren penurunan. Nilai realisasi PNBP pun mengalami penurunan pada tahun 2024, yang juga diikuti dengan penurunan target PNBP pada tahun anggaran 2025. Polri merupakan lembaga yang memberikan kontribusi PNBP terbesar kedua di Indonesia. Kontribusi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Lainnya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 7,33 persen. Cukup besarnya kontribusi PNBP Kepolisian tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi PNBP lainnya. Sehingga tulisan ini akan melihat apakah kinerja PNBP Kepolisian sudah optimal atau belum. Polri menghadapi sejumlah permasalahan dalam upaya penarikan PNBP, baik dalam tahap perencanaan ataupun implementasi. Dalam perencanaan, pemerintah memberikan target PNBP dari Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), namun selama 5 tahun terakhir tidak pernah ada realisasi TCKB. Pelaksanaan penarikan PNBP Kepolisian, khususnya PNBP Kendaraan Bermotor dan PNBP SIM, masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak elastisitasnya PNBP kendaraan bermotor terhadap jumlah kendaraan bermotor, dan PNBP SIM terhadap jumlah SIM yang diterbitkan. Padahal baik jumlah kendaraan bermotor ataupun jumlah SIM yang diterbitkan merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi PNBP. Penggunaan teknologi secara masif di seluruh wilayah dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar, yang pada akhirnya mengoptimalkan realisasi PNBP.

Kritik/Saran

http://pa3kn.dpr.go.id/kontak

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



Next on Buletin APBN Edisi 19 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik Jalan dalam Mendukung Infrastruktur Konektivitas Nasional

Optimalisasi Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk Mendukung Transportasi Umum Terelektrifikasi yang Inklusif

Upaya Meningkatkan Kapasitas Produksi Beras

Dahiri*) Leo Iskandar*)

Abstrak

Turunnya produksi beras berpotensi terhadap ketersediaan akses pangan bagi masyarakat. Seperti melonjaknya harga beras beberapa tahun ini merupakan salah satu indikator adanya permasalahan akses pangan. Penyebab utama ancaman produksi pangan yaitu alih fungsi penggunaanlahan, biaya input produksi, dan minimnya insentif petani sebagai produsen beras. DPR RI khususnya Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk membuat program penanggulangan alih fungsi lahan dengan memberikan insentif bagi petani yang masuk dalam RTRW LP2B. Insentif tersebut berupa beasiswa bagi anak petani, bantuan rice miling unit dan subsidi pupuk khusus.

etahanan pangan merupakan salah satu strategi kebijakan fiskal .2025 dalam upaya mewujudkan Indonesia **Emas** 2045. Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini merupakan bagian dari salah satu misi Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp124,4 triliun. kebijakan bidang ketahanan Prioritas pangan tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan utama yaitu beras, karena beras masih merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. produksi beras nasional tidak selaras dengan kebutuhan konsumsi. Produksi beras cenderung mengalami penurunan, sedangkan konsumsi beras terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2021-2023.

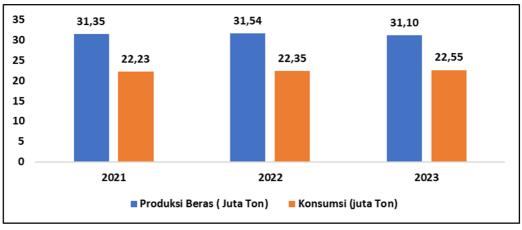
Turunnya produksi beras ini berpotensi terhadap ketersediaan akses pangan bagi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari melonjaknya harga beras selama periode 2018-2023, harga beras terus mengalami peningkatan dari Rp9.798 per kg tahun 2018 menjadi Rp 13.070 per kg tahun 2023.

Penyebab utama ancaman terhadap nilai manfaatnya mungkin belum masuk produksi pangan adalah alih fungsi perhitungan pemilik lahan. Dalam hal ini *) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

lahan. Sebagai contoh, di Kabupaten Buleleng, pemerintah setempat berusaha mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Desakan dari pengembang yang beralasan tingginya kebutuhan perumahan masvarakat membuat pemerintah daerah mempertahankan lahan pertanian yang sudah termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Mariadi dan Surata, 2023). Kedua, kasus di Jawa Timur menunjukkan bahwa peralihan dipengaruhi oleh dua faktor, khususnya faktor langsung (mikro) yang terkait dengan keputusan individu petani. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan. pendapatan, kemampuan ekonomi, pajak, harga, dan lokasi tanah, yang secara langsung memengaruhi keputusan alih fungsi lahan (Rozci, dan Roidah, 2023).

Kedua studi kasus di atas menunjukkan betapa sulitnya mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Dalam kasus ini pemilik tanah merupakan pemegang hak utama terhadap hak atas tanahnya meskipun tanahnya sudah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan yang nilai manfaatnya mungkin belum masuk perhitungan pemilik lahan. Dalam hal ini litas Keyangan Negara. Badan Keahlian. Setien DPR RI.

Gambar 1. Perkembangan Produksi Beras dan Konsumsi Beras



Sumber: BPS dan Kementan, diolah (2024).

legitimasi pemerintah masih sangat lemah dalam mempertahankan lahan pertanian, khususnya untuk kebutuhan pemukiman dan industri. Sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada lahan pangan berkelanjutan dengan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu syarat bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan DAK Fisik Bidang Pertanian. Namun, berdasarkan kedua studi kasus yang telah diberikan di atas, maka DAK Fisik Bidang Pertanian tidak begitu menarik bagi pemilik lahan pertanian, karena hanya pemerintah daerah yang mendapatkan manfaatnya.

Persoalan petani atau pemilik lahan yang sering dikeluhkan adalah biaya input produksi dan nilai keekonomian. Biava input produksi padi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut yaitu bibit dan pupuk/pestisida. Indeks biaya pupuk/pestisida per Januari 2022 sebesar 111,12 menjadi 118,45 per Desember 2023. Sedangkan bibit juga mengalami peningkatan dari 106,69 per Januari 2022 menjadi 113,65 per Desember 2023. Peningkatan tersebut tentunya akan menggerus pendapatan petani, sehingga kenaikan harga tidak begitu berdampak bagi petani. Kemudian, biaya pendidikan bagi anak petani juga turut menggerus pendapatan petani khususnya pendidikan tinggi. Selain biaya

input produksi dan biaya pendidikan, nilai ekonomi komoditas padi juga lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya. Hal ini tercermin dari indeks harga yang diterima petani padi sebesar 137,72 lebih rendah dibandingkan indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 156,27.

Kemudian harga komoditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Harga komoditas padi selama periode 2018-2023 menunjukkan tren peningkatan. Harga padi pada tahun 2018 sebesar Rp5.236 per kg menjadi Rp6.725 per kg tahun 2023. Peningkatan harga ini juga diikuti dengan meningkatnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP tahun 2018 hanya sebesar Rp3.700 per kg menjadi Rp5.000 per kg tahun 2023. Namun, faktanya Kasus harga gabah di bawah HPP menurut data BPS masih banyak terjadi, per tahun 2023 terdapat sebanyak 6.215 kasus. Hal tersebut terjadi karena petani belum mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, petani seharusnya menjadi produsen beras.

Dukungan program pemerintah terhadap biaya input produksi pertanian semakin menurun. Hal ini tercermin dari dukungan subsidi pupuk terus mengalami penurunan selama periode tahun 2018-2023. Subsidi pupuk tahun 2018 sebesar Rp33,61 triliun menjadi Rp26,27 triliun tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada biaya produksi padi yang terus meningkat.

Meningkatnya biaya produksi ini dapat tercermin dari indeks pupuk dan pestisida juga meningkat dari 101,76 tahun 2019 menjadi 118,27 tahun 2023.

Padahal peningkatan kesejahteraan petani merupakan amanat Pasal 64 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, kesejahteraan peningkatan Petani. Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil. Hal ini jelas bahwa Undang-Undang telah mengamanatkan untuk peningkatan kesejahteraan petani, khususnya petani tanaman pangan beras yang menjadi bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting karena merupakan produsen tanaman pokok beras. Apabila petani sejahtera, maka alih fungsi lahan juga dapat teratasi. Artinya pemerintah harus menjaga stabilitas harga komoditas supaya tetap dan khususnya stabil pada saat panen raya. Persoalan sering berulang adalah anjloknya harga komoditas padi saat panen raya, padahal panen raya merupakan waktu yang telah dinantikan oleh para petani.

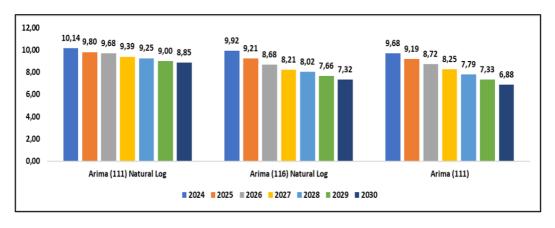
Salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan anjloknya harga komoditas pada saat panen raya adalah transformasi petani menjadi produsen beras, bukan produsen gabah kering panen, atau paling minimal pemerintah mampu mentransformasi petani untuk menjual gabah kering panen menjadi gabah kering giling. Dengan menjadi gabah kering giling, maka masa penyimpanan gabah dapat bertahan lebih lama dibandingkan gabah kering panen. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data bahwa GKG berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, perlunya peningkatan kualitas petani melalui peningkatan pendidikan.

Selain itu, persoalan yang sering muncul adalah pemenuhan terhadap pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi selalu menjadi persoalan setiap tahunnya, mulai dari RDKK hingga distribusi pupuk. pupuk Bahkan anggaran bersubsidi mengalami cenderung penurunan. Penurunan anggaran ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK. Pupuk merupakan salah satu determinan terhadap produktivitas padi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa produktivitas berdampak positif dan signifikan terhadap secara langsung terhadap produksi dan harga GKP.

Urgensinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani untuk menjaga turunnya luas lahan yang eksisting, karena luas lahan selama periode tahun 2018-2023 telah mengalami penurunan seluas 1,16 juta hektar. Dengan asumsi pemerintah tidak ada program peluasan lahan selama periode 2024-2030, maka luas lahan diprediksi terus mengalami penurunan menjadi 7,68 juta hektar tahun 2030 (rata-rata model arima).

Estimasi lahan dari Gambar 2 menunjukkan bahwa luas lahan sangat berpotensi mengalami penurunan. Penurunan ini berdampak terhadap produksi kapasitas produksi beras nasional. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan ke depan jika pemerintah tidak berupaya menahan lajunya alih fungsi lahan. Selain itu, produktivitas juga merupakan variabel dalam menentukan kapasitas produksi, produktivitas sehingga peningkatan menjadi penting untuk dilakukan. Lebih lanjut, tingkat kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada peningkatan melainkan produksi, transformasi petani menjadi produsen beras, karena variabel beras dan GKG berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. Transformasi petani menjadi merupakan produsen beras upaya kesejahteraan meningkatkan petani. Petani dengan menjadi produsen GKP sering mendapatkan ketidakadilan akibat anjloknya harga pada saat panen raya yang tercermin dari kasus harga gabah di bawah HPP, sedangkan HPP masih jauh di bawah harga keekonomian. Upaya

Gambar 2. Prediksi Luas Lahan Tahun 2024-2030 (Juta Hektar)



Sumber: Penulis, diolah (2024).

menjaga alih fungsi lahan ini juga sebagai upaya mendukung ketersediaan beras di tahun depan untuk rencana program pemerintah makan bergizi gratis.

Rekomendasi

Pemenuhan pangan pokok beras merupakan tanggung jawab bagi negara terhadap rakyatnya, namun alih fungsi lahan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Alih fungsi lahan merupakan permasalahan utama bagi kesejahteraan petani. Hal tersebut disebabkan oleh pertama, harga komoditas padi yang sering anjlok ketika saat panen raya. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan nilai tambah hasil komoditi padi menjadi beras. Kedua, biaya input produksi khususnya pupuk terus mengalami peningkatan dan biaya pendidikan bagi anak petani khususnya pendidikan tinggi terus meningkat, sehingga pendapatan petani semakin tergerus. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani sebagai produsen beras.

DPR RI khususnya Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk membuat program penanggulangan alih fungsi lahan dengan memberikan insentif bagi petani yang masuk dalam RTRW LP2B, karena selama ini insentif hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Insentif tersebut berupa beasiswa bagi anak petani, bantuan rice miling unit dan subsidi

pupuk khusus. Beasiswa bagi anak petani yang masuk dalam RTRW LP2B tentunya harus mengambil jurusan di bidang SDM pertanian sehingga pertanian dapat meningkat secara kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan rice miling unit mentransformasi petani dari produsen GKP menjadi produsen beras, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Rice miling unit ini diberikan khusus kepada kelompok-kelompok petani yang masuk dalam RTRW LP2B. Subsidi pupuk khusus diberikan untuk meningkatkan produktivitas padi, karena selama ini akses terhadap pupuk bersubsidi sering kurang dari kebutuhan akibat terbatasnya kuota pupuk bersubsidi. Pemberian pupuk ini juga perlu perbaikan data dalam RDKK petani yang masuk dalam RTRW LP2B. Data tersebut juga harus mengintegrasikan data pemilik lahan dan penggarap lahan, sehingga penerima pupuk dapat lebih tepat sasaran atau penerimaan pupuk bersubsidi ganda.

Daftar Pustaka

Aulele et al. (2018). Analisis Indeks Kepuasan Mahasiswa Jurusan Matematika MIPA Unpatti Terhadap Operator simPATI Menggunakan Structural Equation Modeling. Sainmatika, Vol.15 No. 1, hal. 2.

Gapari, Muhamad Zaril. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sukaraja. Pensa, Vol.3 No. 1, hal. 15.

Mariadi, Ni Nyoman dan Surata, I Gede. (2023). Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 7 No. 1, hal. 143-149.

Ramdan et al. (2017). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah. Agroinfo Galuh, Vol. 4 No. 1, hal. 521.

Rozci, Fatcur dan Roidah, Ida Syamsu. (2023). Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, Vol. 23 No. 1, hal. 35-42.

Optimalisasi PNBP Kepolisian

Ratna Christianingrum*)

Abstrak

Sejak tahun 2021 persentase realisasi PNBP terhadap penerimaan negara menujukan tren penurunan. Nilai realisasi PNBP pun mengalami penurunan pada tahun 2024, yang juga diikuti dengan penurunan target PNBP pada tahun anggaran 2025. Polri merupakan lembaga yang memberikan kontribusi PNBP terbesar kedua di Indonesia. Kontribusi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Lainnya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 7,33 persen. Cukup besarnya kontribusi PNBP Kepolisian tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi PNBP lainnya. Sehingga tulisan ini akan melihat apakah kinerja PNBP Kepolisian sudah optimal atau belum. Polri menghadapi sejumlah permasalahan dalam upaya penarikan PNBP, baik dalam tahap perencanaan ataupun implementasi. Dalam perencanaan, pemerintah memberikan target PNBP dari Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), namun selama 5 tahun terakhir tidak pernah ada realisasi TCKB. Pelaksanaan penarikan PNBP Kepolisian, khususnya PNBP Kendaraan Bermotor dan PNBP SIM, masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak elastisitasnya PNBP kendaraan bermotor terhadap jumlah kendaraan bermotor, dan PNBP SIM terhadap jumlah SIM yang diterbitkan. Padahal baik jumlah kendaraan bermotor ataupun jumlah SIM yang diterbitkan merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi PNBP. Penggunaan teknologi secara masif di seluruh wilayah dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar, yang pada akhirnya mengoptimalkan realisasi PNBP.

• ejak tahun 2021 persentase PNBP terhadap realisasi penerimaan negara menujukan tren penurunan. Kondisi ini terus menurun pada RAPBN 2025. PNBP pada RAPBN 2025 meniadi proporsi PNBP terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 16,86 persen. Nilai realisasi PNBP pun mengalami penurunan pada tahun 2024, yang juga diikuti dengan penurunan target PNBP pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini tentunya menjadi kabar yang baik, mengingat pada tahun kurang 2025 pemerintah memerlukan anggaran yang besar untuk pembiayaan programprogram kerja presiden terpilih.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kementerian/ beberapa Lembaga (K/L) memungut layanan yang diberikan. Pemungutan biaya atas layanan yang diberikan oleh K/L ini menjadi PNBP. Adapun layanan yang menjadi sumber PNBP antara lain komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), layanan administrasi hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham), Jasa transportasi Kementerian perhubungan (Kemenhub), dan Layanan Kepolisian (Republik Indonesia, 2024).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan K/L yang menempati posisi kedua sebagai Lembaga Negara yang memiliki kontribusi PNBP yang besar. Pada tahun 2024, realisasi PNBP Polri diperkirakan akan mencapai Rp10,8 triliun (Republik Indonesia, 2024). Realisasi PNBP Polri ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Lainnya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 7,33 persen. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,38 persen (Republik Indonesia, 2024). kontribusi Cukup besarnva PNBP Kepolisian tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi PNBP lainnya. Sehingga tulisan ini akan melihat apakah kinerja PNBP Kepolisian sudah optimal atau belum.

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Negara dan PNBP



Sumber: Nota Keuangan, diolah (2024).

Keterangan: *) data outlook **) data RAPBN

Perkembangan PNBP Layanan Kepolisian

Pendapatan PNBP Layanan Kepolisian terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pendapatan Pelayanan Kepolisian I dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II. Gambar 1 menunjukkan bahwa target penerimaan dari PNBP Kepolisian, baik Pelayanan Kepolisian I dan Pelayanan Kepolisian Ш selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Realisasi PNBP Pelayanan Kepolisian I justru cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan Kepolisian I mencapai Rp8,91 triliun, namun di tahun 2023 realisasinya hanya sebesar Rp8,2triliun. Kondisi ini juga terlihat dalam presentasi realisasi pendapatan pelayanan kepolisian yang tidak pernah mencapai 100 persen 2018, apabila dibandingkan sejak dengan target PNBP Kepolisian dalam Perpres APBN. Rendahnya realisasi kepolisian I tentunya pendapatan menimbulkan pertanyaan, apakah kineria Polri dalam pengumpulan **PNBP** ini optimal? kurang

Anggaran Pelayanan Kepolisian II menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini juga diikuti dengan tren peningkatan realisasi Pendapatan Pelayanan Kepolisian II. Pada tahun 2017 Pendapatan Pelayanan Kepolisian I hanya ditargetkan sebesar Rp21 miliar, sedangkan di tahun 2023 sebesar

Rp1,14 triliun. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan Pelayanan Kepolisian II mencapai Rp63 triliun atau sebesar 3 kali lipat dari targetnya. Realisasi Pendapatan Kepolisian II pada tahun 2013 hanya sebesar Rp1,14 triliun atau sebesar 102,25 persen dari target pendapatan dalam Perpres APBN.

Pendapatan Layanan Kepolisian I

Pendapatan Pelayanan Kepolisian bersumber dari pendapatan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). perpanjangan SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Penerbitan Tanda Kendaraan Coba Nomor Bermotor (TCKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tanda Nomor Kendaraan (TNKB). Bermotor Keterampilan Mengemudi, Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah. dan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (Kementerian 2024). Keuangan, Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kepolisian I merupakan pelayanan kepolisian yang terkait lalu lintas.

Gambar 2. Perkembangan PNBP Layanan Kepolisian I



Sumber: Perpres APBN (2017-2023), LKPP (2018-2024), diolah.

Gambar menunjukkan kineria Pendapatan Pelayanan Kepolisian I. Gambar 3 menunjukkan bahwa tidak ada realisasi TCKB sejak tahun 2017, namun pada anggaran tahun 2017, 2020, 2022, dan 2023, selalu terdapat penerimaan TCKB. Bahkan pada tahun 2024 target penerimaan pendapatan penerbitan TCKB mencapai Rp134 miliar. Peraturan Kapolri No. Tahun 2012 mendefinisikan TCKB

sebagai tanda legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor sementara berlupa pelat dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, dan dipasang pada kendaraan bermotor. PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Jenis PNBP Polri mengatur mengenai tarif penerbitan TCKB. PP ini dapat menjadi dasar hukum bagi Polri untuk melakukan pemungutan atas penerbitan TCKB, namun realisasi penerbitan TCKB ini selalu 0 rupiah sejak tahun 2017. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah ada kesalahan administrasi pencatatan PNBP atau memang terjadi ketidakoptimalan kinerja Polri dalam memungut PNBP ini?

Gambar 3. Perkembangan Persen Realisasi Pendapatan Layanan Kepolisian I



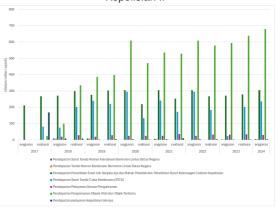
Sumber: LKPP, diolah (2018 -2024).

Pendapatan Layanan Kepolisian II

Pendapatan Pelayanan Kepolisian II bersumber dari pendapatan Surat Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara, pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara, pendapatan penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak Penerbitan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan, pendapatan pelayanan satuan pengamanan, pendapatan pengamanan Objek Vital dan Objek Tertentu, serta pendapatan kepolisian lainnya. pelayanan Pendapatan pengamanan objek vital dan objek tertentu selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan secara signifikan. Pada tahun 2023 pendapatan ini memberikan kontribusi yang besar

terhadap pendapatan layanan kepolisian II, yaitu sebesar 54,78 persen.

Gambar 4. Perkembangan Pendapatan Layanan Kepolisian II



Sumber: Perpres APBN (2017-2023), LKPP (2018-2024), diolah.

PNBP Polri dan Jumlah Kendaraan Bermotor

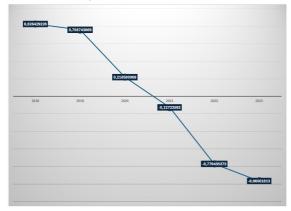
PNBP Polri berhubungan yang dengan kendaraan bermotor terdiri dari pendapatan STNK, BPKB, TNKB, penerbitan surat mutasi ke luar daerah dan nomor registrasi kendaraan bermotor Periode 2017-2023 realisasi pilihan. kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor memiliki pola yang berbeda. Pada periode ini jumlah kendaraan bermotor menunjukkan tren menurun, sedangkan realisasi PNBP Kendaraan bermotor menunjukkan pola fluktuasi dengan tren meningkat.

Selama lima tahun terakhir. dapat diketahui bahwa realisasi **PNBP** Kendaraan bermotor inelastis terhadap perubahan jumlah kendaraan bermotor. Hingga tahun 2020, elastisitas PNBP Kendaraan bermotor terhadap jumlah kendaran bermotor bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap 1 persen peningkatan jumlah kendaraan bermotor diikuti dengan peningkatan PNBP kurang dari 1 persen.

Setelah tahun 2021 realisasi PNBP kendaraan bermotor memiliki nilai elastisitas yang negatif terhadap jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 2021, nilai elastisitas jumlah kendaraan

bermotor terhadap PNBP Kendaraan bermotor mencapai minus -0,13. Hal ini berarti saat terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor di tahun 2021, realisasi PNBP Kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Penurunan iumlah kendaraan bermotor yang terdaftar terjadi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya perekonomian Indonesia. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi ini. Pada tahun 2021, sektor industri otomotif belum mengalami perbaikan. Bahkan stimulus fiskal vang dikeluarkan pemerintah pajak Pajak berupa diskon atau Penjualan Barang Mewah Ditanggung (PPnBM Pemerintah DTP) belum mampu meningkatkan daya beli di sektor otomotif. Maraknya sosialisasi tentang implementasi Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009, disinyalir menjadi salah faktor yang mempengaruhi peningkatan PNBP Kendaraan bermotor. 72 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor apabila tidak dilakukan perpanjangan STNK hingga 2 tahun sejak habis masa berlakunya. Adanya sosialisasi terkait implementasi penghapusan data kendaraan bersamaan dengan kebijakan yang penghapusan sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pada tahun 2021 daerah mampu menstimulus warga untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Gambar 5. Elastisitas Jumlah PNBP Kendaraan Bermotor terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor



Sumber: Penulis, diolah (2024).

Pada tahun 2023, elastisitas negatif PNBP Kendaraan Bermotor terhadap jumlah kendaraan bermotor mencapai titik terendah, yaitu sebesar -0,97. Kondisi ini terjadi akibat implementasi kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor apabila tidak melakukan perpanjangan STNK selama 2 tahun. Penerapan kebijakan ini menyebabkan kendaraan bermotor jumlah yang ter-registrasi mengalami penurunan mencapai 6 persen di tahun 2023. Di tahun yang sama, realisasi PNBP Kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya ketakutan masyarakat apabila melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka kendaraan yang dimiliki tidak dapat digunakan di jalan raya dan dianggap sebagai kendaraan bodong. Peningkatan PNBP ini juga terjadi seiring dengan adanya perbaikan perekonomian di Indonesia.

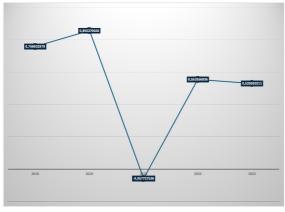
PNBP Polri dengan jumlah SIM yang diterbitkan

Pola realisasi PNBP SIM dengan jumlah SIM yang diterbitkan menunjukkan pola yang sama. Pada tahun 2020, realisasi jumlah SIM yang diterbitkan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini juga diikuti dengan menurunnya realisasi PNBP SIM. Namun penurunan jumlah SIM yang diterbitkan jauh lebih tajam dibandingkan dengan realisasi PNBP SIM. Penurunan jumlah SIM yang diterbitkan disinyalir terjadi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah SIM yang diterbitkan mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan realisasi PNBP SIM.

Selama 5 tahun terakhir, PNBP SIM inelastis terhadap perubahan jumlah SIM yang diterbitkan. Kondisi ini dapat diartikan bahwa setiap pertumbuhan jumlah SIM sebesar 1 persen, realisasi PNBP SIM meningkat kurang dari 1 persen. Bahkan di tahun 2023, realisasi PNBP SIM hanya mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen saat terjadi peningkatan jumlah SIM yang diterbitkan sebesar 1 persen.

Apabila dilakukan pengukuran korelasi antara Jumlah SIM yang diterbitkan dengan realisasi PNBP SIM, diperoleh bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah SIM dan realisasi PNBP SIM. Padahal setiap penerbitan SIM, baik penerbitan baru ataupun perpanjangan, masyarakat dikenakan biaya sebesar Rp30.000 hingga Rp 100.000. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurang optimalnya pemungutan PNBP SIM. Belum adanya tertib administrasi dalam pemungutan PNBP SIM menjadi salah satu penyebab tidak elastisitasnya iumlah SIM terhadap PNBP Penelitian yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli menyatakan bahwa masih banyak praktik pungutan liat yang dilakukan dalam pengurusan SIM (Puslitbang Polri, NA).

Gambar 6. Elastisitas PNBP SIM terhadap Jumlah SIM yang Diterbitkan



Sumber: Penulis, diolah (2024).

Rekomendasi

Komisi III DPR RI perlu mendorong Kepolisian untuk mengoptimalkan penarikan PNBP Kendaraan Bermotor dan PNBP SIM. Penggunaan teknologi secara masif di seluruh wilayah dapat mencegah terjadinya pungutan liar dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor serta SIM sehingga realisasi PNBP dapat lebih optimal.

Komisi III DPR RI perlu meningkatkan pengawasan terkait perencanaan target PNBP TCKB hingga pelaksaan pemungutan PNBP TCKB. Komisi III

DPR RI dapat melakukan investigasi penyebab tidak adanya realisasi TCKB, padahal terdapat target PNBP TCKB dan peraturan yang mengatur tarif TCKB. Apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak adanya realisasi TCKB disebabkan ketidakoptimalan pelaksanaan pemungutan PNBP TCKB, penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu solusi. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemungutan PNBP, khususnya TCKB, diharapkandapatmeminimalisirterjadinya pungutan liar. Pemanfaatan teknologi tidak hanya untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan PNBP namun sekaligus menjadi sistem pengawasan dalam pelaksaan pemungutan PNBP., khususnya TCKB.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023 Audited.

Republik Indonesia. (2024). BUKU II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PRODUK PA3KN

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Ribbe for large which has all seasons of inflance
"EVIDANCE-DASID LEGISLATIVE POLICY-MAKEIO"

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara







ANALISIS RINGKAS CEPAT BERDASARKAN PERMINTAAN ANGGOTA DPR RI





JURNAL



KAJIAN TEMATIK



SEKILAS APBN

Baca Selengkapnya









